

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DURI
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Bella Maharani

NPM : 177110379

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Bella Maharani
NPM : 177110379
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis

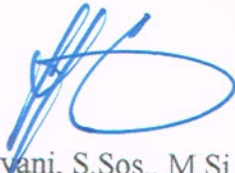
Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 07 April 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Pembimbing



Kartius S.Sos., M.AP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Bella Maharani
NPM : 177110379
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian konfrehensif fakultas ilmu sosial dan ilmu politikk dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 07 April 2021

Ketua,



Kartius S.Sos., M.AP

Sekretaris,



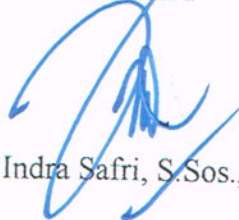
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si
Anggota,



Made Devi Wedayanti, S.AP., M.SI

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bella Maharani
NPM : 177110379
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 07 April 2021
A.n Tim Penguji

Ketua,



Kartius S.Sos., M.AP

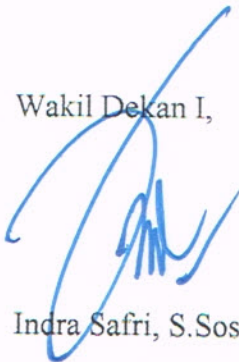
Sekretaris,



Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan terimakasih yang tiada terhingga. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan karunianya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku abang dan adik adik tercintaku dan jga kepada teman – temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta memotivasiku dalam menyelesaikan studi semoga Allah SWT membahis amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Aamiin...

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang diberikanNya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Kemudian pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan proposal penelitian ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektorat Universitas Islam Riau, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Bapak Kartius S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses pembimbingan berlangsung.
5. Bapak dan ibu dosen ilmu Administrasi Publik yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang mana telah memberikan ilmu dan wawasan yang begitu besar sehingga membantu penulis dalam menyusun proposal penelitian ini.

6. Kedua orang tua saya tercinta, adik – adik, beserta keluarga dan kerabat penulis yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan motivasi baik secara moral dan material kepada saya.
7. Semua teman – teman seperjuangan terutama kelas A jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 dan sahabat – sahabat saya Silvia Enita, Tirani, Rantika Listihara dan Irene Oktaviani yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang penulis kerjakan ini mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan. Amin ya Allah.

Pekanbaru,03 Maret 2021

Penulis

BELLA MAHARANI



DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Kebijakan	15
a) Implementasi Kebijakan Publik	18
b) Model – Model Implementasi	21
2. Konsep Pengelolaan	30
3. Konsep Sampah	32
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	35

D. Konsep Operasional Variabel	37
--------------------------------------	----

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Key Informan Dan Informan	41
D. Teknik Penarikan Sampel	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	44
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	45

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Mandau	47
B. Keadaan Umum Kecamatan Mandau	49
a) Penduduk	49
b) Pendidikan	50
c) Ekonomi	51
C. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	52
D. Struktur Organisasi UPT Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	55

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	56
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
2. Identitas Responden Berdasarkan Umur	58
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	59
B. Hasil Dan Pembahasan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis	61
C. Hambatan – Hambatan Atau Kendala Dalam Pelaksana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis	82

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR KEPUSTAKAAN88

LAMPIRAN92



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II. 1 : Penelitian Terdahulu	34
II. 2 : Operasional Variabel	39
III. 1 : Key Informan dan Informan UPT Pengelolaan Sampah	41
III. 2 : Informan Masyarakat	42
III. 3 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis	46
IV. 1 : Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Kota Duri Kabupaten Bengkalis	47
IV. 2 : Jumlah penduduk Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Kota Duri Kabupaten Bengkalis	49
IV. 3 : Jumlah sekolah berdasarkan pendidikan di Kota Duri Kabupaten Bengkalis	50
IV. 4 : Sektor Perdagangan Di Kota Duri Kabupaten Bengkalis	51
V. 1 : Klasifikasi Responden UPT Pengelolaan Sampah Dan Petugas Pengelola Sampah berdasarkan Jenis Kelamin	57
V. 2 : Klasifikasi Responden Masyarakat berdasarkan Jenis Kelamin	57
V. 3 : Klasifikasi Responden UPT Pengelolaan Sampah Dan Petugas Pengelola Sampah berdasarkan Umur	58
V. 4 : Klasifikasi Responden Masyarakat berdasarkan Umur	59
V. 5 : Klasifikasi Responden UPT Pengelolaan Sampah Dan Petugas Pengelola Sampah tingkat Pendidikan	60
V. 6 : Klasifikasi Responden Masyarakat berdasarkan Tingkat Pendidikan...60	
V. 7 : Data Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Kota Duri 2020	65
V. 8 : Data Tempat Penampungan Sementara (TPS) Di Kecamatan Mandau .66	
V. 9 : Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2019	69
V. 10 : Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas pengangkut sampah di UPT dinas lingkungan hidup kota Duri Kabupaten Bengkalis	76

V. 11 : Data Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Mandau83

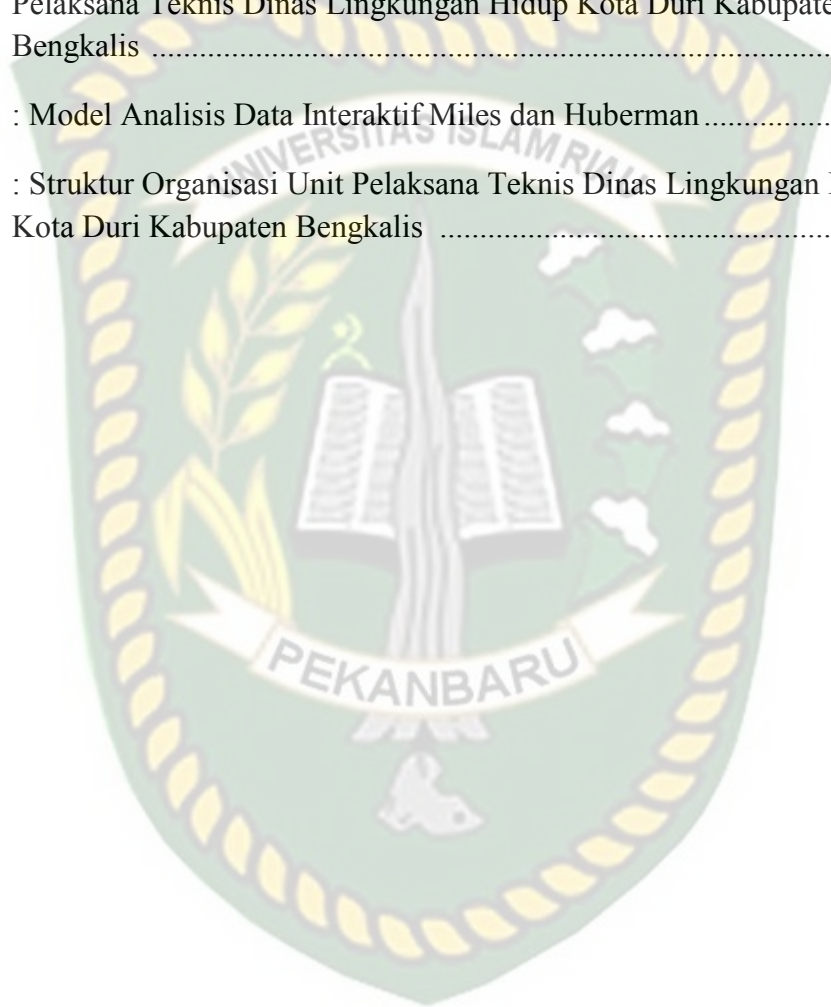


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I. 1 : Jumlah Daya Tampung TPA Tahun 2012/2017 Di Kota Duri	8
II. 1 : Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis	36
III. 1 : Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	45
IV. 1 : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis	55

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Halaman
1 : Daftar Wawancara Kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah	94
2 : Daftar Wawancara Kepada Staf UPT Pengelolaan Sampah	99
3 : Daftar Wawancara Kepada Petugas Pengelola Sampah	104
4 : Daftar Wawancara Kepada Masyarakat	107
5 : Foto Dokumentasi Penelitian Hasil Observasi Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kecamatan Mandau	110
6 SK Dekan Fisipol UIR No.212/UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Bella Maharani	117
7 Surat Rekomendasi Penelitian No. 503/DPMPTSP/NON IZIN- RISET/37214 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	118
8 Surat Rekomendasi Penelitian No. 061/DPMPTSP-JU/XII/2020/680 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	119
9 : Surat Keterangan No. 800/DLH-PS/249 Tanggal 29 Desember 2020 Tentang pelaksanaan kegiatan riset dan pengumpulan data an. Bella Maharani	120

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru peserta ujian skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Maharani
NPM : 177110379
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak ada unsur plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacuh pada kaedah – kaedah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya ini adalah benar – benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan yang ada pada butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti dan serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dari fakultas dan universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 April 2021

Yang menyatakan

Bella Maharani

177110379

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DURI
KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

Bella Maharani

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengelolaan sampah di perkotaan Duri, Kecamatan Mandau. Tipe penelitian ini yaitu tipe deskriptif metode Kualitatif. Penelitian difokuskan pada tata kelola sampah yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri. Pengamatan penelitian hanya dilakukan pada wilayah Duri kota, khususnya pada blok – blok pengangkutan sampah yang dilakukan oleh UPT pengelolaan sampah Duri Kota. Variabel penelitian ini meliputi Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Atau Kecenderungan “Disposition” Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik. populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu petugas UPT, berjumlah 12 orang dan masyarakat berjumlah 18 orang. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri cukup terlaksana. Kesimpulan penelitian ini kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah karena minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, Terkait hal tersebut pengelola perlu memperhatikan sumberdaya anggaran semaksimal mungkin guna penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Duri Perkotaan.

**IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN THE
TECHNICAL IMPLEMENTING UNIT OF THE ENVIRONMENTAL
SERVICE, DURI CITY, BENGKALIS DISTRICT**

ABSTRACT

Bella Maharani

Keywords: implementation, policy, management, waste.

This study aims to understand waste management in the urban area of Duri, Mandau District. This type of research is descriptive type using qualitative methods. The research is focused on solid waste management which is carried out by the Technical Implementation Unit of the City of Duri Environmental Agency. The research observations were only carried out in the Duri Kota area, especially in the garbage collection blocks carried out by the Duri Kota waste management UPT. The variables used as references in this study include Resources, Characteristics of Implementing Agents, Attitudes or Tendencies of Implementers' Disposition, Inter-Organizational Communication and Activities of Implementers, Economic, Social, and Political Environment. There are two population groups and the sample in this research, namely UPT officers, totaling 12 people and the community totaling 18 people. The results of the research on the implementation of solid waste management policy at the technical implementation unit of the Duri City Environmental Service were quite successful. The conclusion of this research is the lack of waste management facilities and infrastructure due to the lack of budget provided by the government. Related to this, managers need to pay attention to budget resources as much as possible in order to provide facilities and infrastructure for waste management in Duri Urban.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia.

Pentingnya pengelolaan kebersihan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan dan serta kepedulian Pemerintah Kota Duri terhadap pengelolaan lingkungan hidupnya, hal ini menarik minat peneliti untuk mengamati lebih mendalam perihal Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis.

Dalam Undang – Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Baik itu sampah yang bersifat organik (mudah membusuk) maupun anorganik (sulit membusuk) yang ada di lingkungan sekitar kita.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-

hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari satu keluarga di setiap rumah tangga. Semakin tinggi tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dalam setiap rumah tangga semakin banyak sampah yang dihasilkan.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Duri dalam mengelola sampah kota Duri adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkalis No 2 Tahun 2015, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Pasal 3 adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah. Tugas pemerintah daerah dalam Pasal 6 (a) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sampah yang diangkut Unit Pengelolaan Sampah terdapat dalam pasal 4 sampah yang dikelola Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkalis No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang bersal dari kegiatan sehari – hari rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial , kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, setiap penduduk diwajibkan mengelompokkan sampah. Dalam pasal 10 Ayat (2) pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Menyediakan wadah penampungan sampah didepan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah yang mengandung limbah B3.
- b. Memilah sampah sejak awal dengan menempatkan kedalam wadah penampungan sampah yang telah disediakan.
- c. Mengupayakan penggunaan atau pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik / kresek, bungkus kado, botol, kaleng drum dan lainnya.
- d. Mengupayakan mengelola atau memanfaatkan sampah organik antara lain untuk membuat kompos, menjadikan pupuk dengan menimbun kedalam tanah, menjadikan sumber pangan hewan dan lainnya.
- e. Mengupayakan mengangkut atau mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah.

- f. Mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang ada dipersil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha, atau dilahan milik umum atau lahan terbuka hijau, yang terletak didepan atau samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat usaha.
- g. Mengambil atau mengangkat sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak disempadan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menempatkannya diwadah sampah sesuai dengan jenis atau sifatnya.
- h. Mencegah pembuangan sampah ke tempat – tempat yang dilarang untuk membuang sampah, dan
- i. Mengumpulkan dan memilah sampah yang berada dikapal untuk selanjutnya menempatkan diwadah sampah yang sudah disediakan, baik yang berada dilokasi pelabuhan atau diluar lokasi pelabuhan.

Fenomena pelaksanaan pengelolaan sampah di Duri perkotaan berdasarkan realitasnya, masih banyak masyarakat yang tidak menempatkan / mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah unsur Pelaksana Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya

mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Organisasi pemerintah daerah yang diamanahkan untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, pasal 4 (e): Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Duri dengan klasifikasi kelas A, wilayah kerja UPT Dinas Lingkungan Hidup meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan yang di urus oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktifitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri, jumlah penduduk di Kecamatan Mandau Dan Bathin Solapan pada Tahun 2019 yaitu 157,329 jiwa. Perkembangan terbesar penduduk terjadi di Kecamatan Mandau.

Dalam pemungutan sampah dan retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup kota Duri bekerjasama dengan pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Kelurahan. Seperti Badan Usaha Milik Desa di Kelurahan Simpang Padang yang mengambil alih juga di Kelurahan Batang Dui, Badan Usaha Milik Desa di Kelurahan Batin Solapan, Badan Usaha Milik Desa di Sebangar. Sedangkan untuk Kelurahan Pematang Pudu mempunyai bank sampah sendiri dalam pengelolaan sampah. Sampah – sampah dari pihak BUMDES tersebut diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) milik Dinas Lingkungan Hidup. Setiap pihak harus melapor ke Dinas Lingkungan Hidup untuk bekerjasama menjadi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di Kota Duri.

Minimnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang disediakan oleh pemerintah menyebabkan banyak masyarakat yang sulit untuk menemukan tempat pembuangan sampah terdekat disekitarnya. TPS yang disediakan pemerintah di Kota Duri hanya 5 TPS. Jauhnya jarak TPS ini dengan tempat tinggal warga sehingga menyebabkan terjadinya pembuangan sampah di sekitar perkarangan yang tidak ditunggu oleh pemiliknya (lahan kosong) dan keterlambatan jadwal pengangkutan sampah membuat volume sampah semakin menumpuk dan menyebabkan pencemaran lingkungan dan keterbatasan jumlah sumber daya membuat terlambatnya pengangkutan sampah.

Sampah terbagi menjadi 3 golongan menurut jenisnya (Sejati, 2009:14) yaitu:

1. Sampah Organik atau basah

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun – daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa

buah, Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk atau hancur) secara alami.

2. Sampah Anorganik atau kering

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya logam, besi, kaleng, plastic, karet, botol, dan kaca.

3. sampah berbahaya

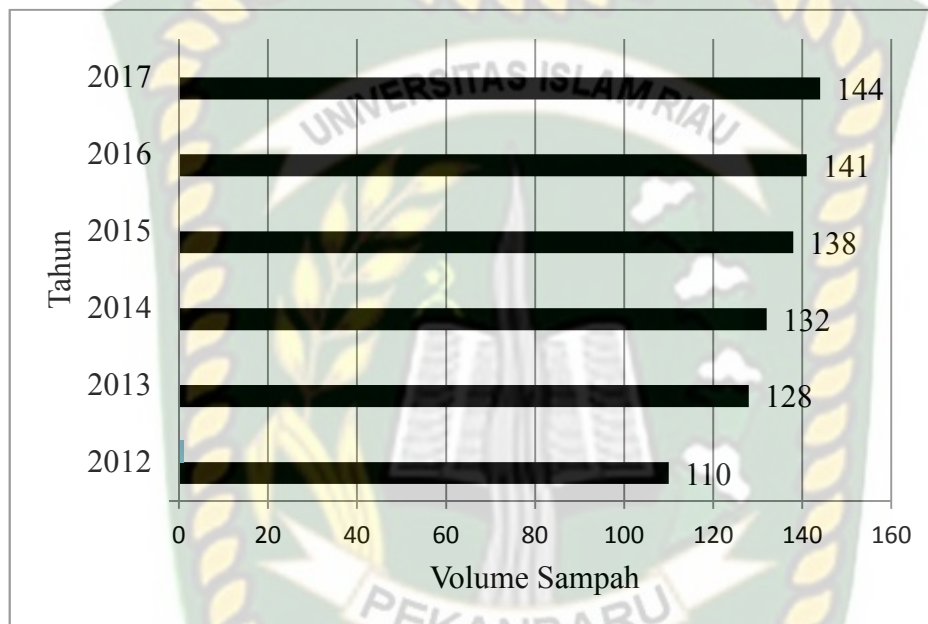
Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya: baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.

Berdasarkan laporan harian sampah yang masuk ke TPA, Jenis sampah yang diangkut yaitu sampah organik dan sampah anorganik. yang Jumlah timbulan sampah domestik (skala Kabupaten) adalah $252 \text{ m}^3/\text{hr}$ sedangkan jumlah timbulan sampah perkotaan sebesar $201 \text{ m}^3/\text{hr}$. persentase sampah organik kota Duri sebesar 69% dan presentase sampah anorganik sebesar 31%. Jumlah timbulan sampah yang diangkut ke TPA $144 \text{ m}^3/\text{hr}$.

Sampah masyarakat ditampung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang mulai beroperasi sejak Tahun 2014. TPA tersebut berada di Jalan Lintas Duri-Dumai Kilometer 9 Gang. Suliki, Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. TPA ini menggunakan sistem operasi *Open Dumping*. Sisa umur operasional TPA hanya $\pm 2,5$ Tahun dengan luas lahan TPA ± 5 Ha dan luas terpakai $\pm 4,5$ Ha. Penangan sampah khususnya untuk pengangkutan hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah di Kecamatan Mandau dan Kecamatan

Bathin Solapan ditangani langsung oleh petugas resmi dari UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan. Berikut ini jumlah daya tampung TPA sampah yang berada kota Duri.

Gambar I.1: Jumlah Daya Tampung TPA Tahun 2012-2017 Kecamatan Mandau Kota Duri.



Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri, 2020.

Berdasarkan gambar I. 1 diatas tahun 2012 volume sampah di kota Duri mencapai 110 m³/tahun, pada tahun 2013 volume sampah mencapai 128 m³/tahun, volume sampah pada tahun 2014 mencapai 132 m³/tahun, volume sampah pada tahun 2015 mencapai 138 m³/tahun, volume sampah pada tahun 2016 mencapai 141 m³/tahun, dan volume sampah pada tahun 2017 mencapai 144 m³/tahun.

Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber timbulan sampah dan/atau tempat pembuangan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.

Tata cara perhitungan SPM Pengangkutan sampah sebagai berikut :

$$\text{SPM} = (A / B) \times 100 \%$$

Dimana :

- A =Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)
- B =Jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

$$A = (C \times 1.000 \times D \times E) / F$$

Dimana :

- C = Kapasitas kendaraan pengangkut (m³/unit)
- D =Jumlah ritasi (kali/hari)
- E = Jumlah truk (unit)
- F = Timbulan sampah (liter/jiwa/hari)

Untuk mengangkut penumpukan sampah yang ada di Kota Duri, Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau menyiapkan kendaraan operasional sebanyak 16 kendaraan. jumlah sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah masih belum cukup untuk mengangkut sampah di Kota Duri. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk pengelolaan sampah hanya 200 juta untuk 24 Kelurahan Di Kota Duri.

Dalam pengangkutan sampah UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau menghimbau kepada masyarakat kecamatan Mandau untuk membuang sampah di TPS yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati yaitu pada jam 06. 00 WIB – 20.00 WIB, tetapi pelaksanaannya beberapa TPS hanya dibolehkan membuang sampah jam 18.00 WIB seperti TPS

di Pasar Dewi Sartika dan TPS pasar Mandau Raya. Padatnya jumlah penduduk yang berada di daerah tersebut membuat banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 59 Ayat 2 pemerintah menetapkan aturan bagi yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi denda Rp. 2.500.000 / Kurungan paling lama 3 bulan.

Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Maka perlu adanya pengelolaan sampah, pengelolaan sampah menurut (Sejati, 2009: 24) adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer sampah, pengolahan, dan pembuangan akhir.

Melihat keadaan yang ada bahwa volume sampah semakin lama semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari fenomena – fenomena yang penulis temukan sebagai berikut.

- 1) Kurangnya Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) di Kota Duri hingga munculnya TPS yang bukan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri.
- 2) Masih ditemukannya beberapa tumpukan sampah di sekitar permukiman masyarakat, pasar, dan sepanjang jalur hijau Kecamatan Mandau.
- 3) Semakin meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun.

- 4) Kurangnya kendaraan operasional pengangkutan yang disediakan pemerintah untuk Duri Perkotaan.
- 5) Minimnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk pengelolaan sampah di Duri Perkotaan
- 6) Adanya pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah di Duri Perkotaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian – uraian pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka penulis hendak mencari tahu mengenai :

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis .
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan atau kendala Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik, khususnya mengenai aspek – aspek kebijakan publik. Diharapkan temuan – temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan publik terutama kebijakan pengelolaan sampah.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran atau pemikiran, serta upaya – upaya yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam memaksimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep dan ketentuan – ketentuan serta aturan – aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

1. Konsep Administrasi Publik

Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Prodi Administrasi Publik perlunya kita mengetahui konsep Adminstrasi Publik. Adminstrasi menurut Leonard B. White (dalam Maksudi 2017: 27) *adminstration is process common to all group efforts, public or private, civil of military, large scale or small scala...etc.*” White, memberikan pemahaman bahwa adminstrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat di setiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil.

Selanjutnya menurut para ahli Dwight Waldo (dalam Maksudi 2017: 27) administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Sedangkan Hebert A. Simon (dalam Maksudi 2017: 28) *“administration can be defined as the activities of groups cooperating to acomplish common goals”*. Simon memberikan pemahaman bahwa adminstrasi sebagai kegiatan – kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

2. Konsep Organisasi

Dalam konteks studi administrasi adanya organisasi yang mengelola untuk tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pakar Siagian (dalam Zulkifli dan Yogya 2014: 15 - 16) merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerjasama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam kegiatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Definisi Massie (dalam Zulkifli dan Yogya 2014: 16) yaitu, organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas – tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan – hubungan kerja dan menyatukan aktifitas – aktifitasnya kearah tujuan bersama.

Kemudian Soffer (dalam Zulkifli dan Yogya 2014: 16) mengatakan Organisasi adalah tindakan pendistribusian peranan kepada setiap anggota untuk melaksanakan rincian tugas tertentu dalam rangka upaya menghasilkan beberapa bentuk produk.

3. Konsep Manajemen

Supaya mencapai tujuan organisasi perlunya manajemen di dalamnya. Definisi ahli memandang manajemen dari sudut yang berbeda yaitu beberapa ahli memandang manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, ahli lain memandang manajemen sebagai suatu proses dan sebagai profesi, Badrudin (dalam Sudaryono, 2017: 4).

Di lain pihak Manullang (dalam Sudaryono, 2017: 5) mengemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

George R. Terry dan Leslie (dalam Sudaryono, 2017: 6) mengartikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang kearah tujuan – tujuan organisasional atau maksud – maksud nyata.

4. Konsep Pengambilan Keputusan

Langkah – langkah pengambilan keputusan, Siagian(dalam Zulkifli dan Yogia 2014: 65-66) menjelaskan bahwa teori dasar pengambilan keputusan berkisar pada pengambilan tujuh langkah pemecahan apabila seseorang menghadapi suatu situasi problematik, ketujuh langkah tersebut meliputi:

- 1) Mengidentifikasi masalah dan membuat definisinya.
- 2) Mengumpulkan dan mengelola data sehingga tersedia informasi yang mutakhir, lengkap, dapat dipercaya, dan tersimpan dengan baik sehingga mudah ditelusuri kembali apabila diperlukan.
- 3) Mengidentifikasi berbagai alternatif yang mungkin ditempuh.
- 4) Menganalisa dan mengkaji setiap alternatif yang tidak diidentifikasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya.
- 5) Menjatuhkan pilihan pada satu alternatif yang tampaknya terbaik dalam arti mendatangkan manfaat yang lebih besar.

- 6) Melaksanakan keputusan yang diambil
- 7) Menilai apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan dan rencana atau tidak.

Pakar Hebert A. Simon (dalam Zulkifli dan Yogia 2014: 66) membedakan dua jenis keputusan, yaitu:

- 1) Keputusan yang diprogram (*programed decisions*). Jika sering terjadi suatu situasi khusus, maka biasanya akan digunakan prosedur rutin untuk memecahkannya.
- 2) Keputusan yang tidak diprogram (*non-programmed decisions*). Keputusan itu tidak diprogram jika keputusan itu baru dan tidak tersusun.

5. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2016:16) kebijakan sebagai: “... *a proposed course of action of a person, group, or government, within given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*”. Makna kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan ditambahkan Friedrich (1960: 80) sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan mempunyai perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan milik Friedrich. Bagaimanapun juga

kebijakan harus menunjukkan “apa yang sesungguhnya dikerjakan” daripada “apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan” pada suatu masalah.

Kemudian Eulau dan Prewitt (dalam Agustino 2016: 16) mengemukakan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dalam pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan publik: “... *what governments do, why they do it, and what difference it makes*” menurut Dye (Agustino, 2016: 15). Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*). Bahkan dari sudut pandang lain, Dye (1992: 2) menulis pula kebijakan publik sebagai : “*anything a government chooses to do or not to do*”. Menurut takrif ini, semua pilihan – pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Selanjutnya usaha untuk mentakrifkan kebijakan publik juga dilakukan oleh Wiliam. I Jenkis (Agustino, 2016: 16-17) beliau menjelaskan kebijakan publik: “... *a set of interrelated decision taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actors to achieve.*” Jenkins memandang kebijakan publik sebagai suatu proses, tidak seperti Dye (1992) yang menilainya sebagai pemilihan pemerintah.

Bahkan lebih jelas lagi, Jenkins menyatakan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berhubungan. Dalam kata lain Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*.

Jadi berdasarkan pengertian dari berbagai para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan – tindakan pemerintah yang dilandasi pemikiran rasional dalam mengatasi permasalahan publik. Setiap kebijakan publik terdapat elemen – elemen yang melatarbelakanginya. Elemen yang terkandung dalam kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson (Islamy dalam Widodo, 2013:14) mencakup hal – hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat – pejabat pemerintah
- c. Kebijakan adalah apa yang benar – benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka perlunya dilakukan pengimplementasian kebijakan publik.

a. Implementasi Kebijakan Publik

- **Model implementasi menurut George C Edwards III** (dalam Subarsono, 2008 :94) dapat dilihat dari berbagai perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach*. Edward III juga mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pernyataan pokok, yakni: faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan faktor apa yang menghambat keberhasilan kebijakan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi / pelaksana dan struktur organisasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.
- **Selanjutnya Model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975: 462-474)**, kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standard dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Model yang mereka kembangkan lebih populer disebut sebagai *A Model Of The Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa model kinerja

kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan. Model yang ditawarkan meliputi 6 variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Model ini tidak hanya menentukan hubungan – hubungan antara variabel – variabel bebas dan variabel terkait mengenai kepentingan – kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan – hubungan antar variabel bebas. Variabel tersebut, seperti diukur oleh Tachjan (2008: 39-40), yang meliputi: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik, organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan – kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

- **Sedangkan model Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier** (dalam Agustino, 2016:128) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan dalam bentuk undang – undang. Tapi dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting ataupun badan peradilan. keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.
- **Ripley dan Franklin (1986:232)** dalam bukunya yang berjudul *Policy Implementation And Bureaucracy*, menulis tentang *Tree Conceptions*

Relating To Successful Implementation. menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan

Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree compliance on the statute*), tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat ukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan mandat yang telah diatur.

2. Lancarnya pelaksanaan

Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, (*smoothly functioning rouctoning routine and the absence of problem*), keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

3. Kinerja dan dampak

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*), bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi.

- **Sumaryadi** juga mengungkapkan implementasi kebijakan adalah suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadi perbedaaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang sesungguhnya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksana kebijaksanaan), perbedaan tersebut

tergantung pada *implementation capacitu* yang dipercaya pengemban tugas mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut (dalam Sumaryadi, 2005: 80).

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah tindakan atau keputusan yang dibuat oleh kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang dibuat dalam suatu kebijakan untuk tercapainya tujuan – tujuan.

b. Model – Model Implementasi

- **Edward III** (dalam Arifin 2014: 61) mengemukakan: “ *In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the precondition for succsesful policy implemntation? What are primary obstacles to succsesfull policy implementation?*” setidaknya George C. Edward III mengatakan bahwa didalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagian pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Edward III (dalam Zaini dan Hafis 2015;69), dinamakan dengan “Direct and indirect impact of implementation.”

Dalam pendapat ini, Edward III (1980, dikutip dari Agustino 2008; 150) menawarkan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang mencapai sasaran kebijakan tercipta jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal tersebut akan terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut bisa dikoordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu juga komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus akurat dan konsisten.

3 indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a. Transmisi “penyalur komunikasi”, yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Yang sering kali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi yaitu adanya miskomunikasi sehingga kebijakan yang dibuat dengan sedemikian rupa terditorsi saat sampai pada posisi tertentu.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksanaan kebijakan “*street level bureaucrats*” harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak pada penyelewengan kebijakan.
- c. Konsistensi, komunikasi yang disampaikan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka akan terjadilah kebingungan dalam pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan suatu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimana baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber – sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Menurut Edward III Ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel sumberdaya tersebut yaitu.

- a. Staf. Sumber daya penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi atau memadai dan bahwa tidak berkompeten dibidangnya. Oleh karena itu, sumber daya yang kompeten dan kapabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi. Pada implementasi kebijakan publik, informasi terbagi menjadi dua bagian, pertama informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor

penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu, informasi tentang kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

- c. Wewenang. Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para implementator dapat melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. George C. Edward III (dalam Widodo 2015: 102-103) menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang kompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

3. Sikap (disposisi)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Apabila kebijakan ingin terlaksana dengan baik, implementator tidak hanya memiliki

kemampuan melaksanakannya. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk melaksanakan kebijakan (Edward III, dalam Widodo 2015: 104). Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Variabel disposisi menurut Edward III antara lain, yaitu:

- a. pengangkatan Birokrat, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Terutama untuk kepentingan masyarakat.
- b. insentif, untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah yang baik dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Point terakhir menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Jika semua sumberdaya yang dibutuhkan tersedia dengan baik para pelaksana bahkan mengetahui apa yang harus dilakukan bahkan berkeinginan untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang telah diputuskan berkemungkinan kebijakan tersebut tidak

terlaksana karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses perumusannya dan penuh dengan kompetisi serta permainan politik. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan banyak orang atau saling kerjasama. Apabila distruktur tidak bisa menciptakan kondisi yang kondusif dengan kebijakan yang ada bagaimana mungkin kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan efektif. Hal ini bisa menghambat jalannya kebijakan.

Ada dua karakteristik yang disebutkan Edward III untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu Standar Operating Procedures (SOP) dan melakukan fragmentasi atau melakukan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan – kegiatan atau aktivitas – aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

- **Selanjutnya, Ada enam variabel menurut “Van Metter dan Van Horn”** yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut (dalam Agustino 2014; 141-144) yaitu :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal “bahkan terlalu utopis” untuk dilaksanakan dilevel warga maka agak sulit

merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya financial dan sumber daya waktu karena, mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat maka hal inipun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan “publik” akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal maka agen pelaksanaan proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia maka dapat dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan mana kala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cangkupan implementasi kebijakan maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap atau Kecendrungan “Disposition” Para Pelaksana

Sikap pelaksana, menunjukkan bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini (Dwiyanto 2009:39). Sikap penerimaan atau penolakan dari “agen” pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja

implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator pelaksanaan adalah kebijakan dari atas “Top Down” yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui “bahkan tidak mampu menyentuh” kebetulan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh “Van Metter dan Van Horn” adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

- **Model implementasi lainnya dikemukakan oleh pakar Grindle (1980)** yang lebih dikenal dengan pendekatan *Top Down*. Pendekatan ini lebih dikenal dengan *implementation is a political and administrative process*. Menurut Grindle variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik meliputi 2 hal:

1. Mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Tolak ukurnya terlihat dari 2 faktor yaitu: *pertama*, impact dan efek pada masyarakat secara individu dan kelompok; *kedua*, tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.

Oleh karena itu, Grindle (1980) mengomentari mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut: implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik kedalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran – saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

6. Konsep Pengelolaan

Good Governance adalah sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika professional dalam berusaha / berkarya. *Good Governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat

peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan maupun pelayanan publik.

Menurut Sedarmayanti (2003:5). Terdapat 3 model tata pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. *Political governance* adalah suatu yang menitikberatkan pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (*polity / strategy formulation*).
2. *Economic Governance* adalah proses pembuatan keputusan dengan memberikan fasilitas berupa kekayaan (*equity*), (*proverty*), serta kualitas hidup (*quality of life*).
3. *Administrative Governance* adalah sesuatu yang terkait pada sistem implementasi kebijakan.

Prinsip – prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti (dalam United Nations Development Program 2003:7) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. *Rule Of Law* (penegak hukum) yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

4. Konsensus yaitu perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara musyawarah menjadi konsensus.
5. Responsiveness (daya tanggap) yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
6. Efektivitas dan efisiensi yaitu pemerintah harus efektif dan efisien dalam proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah diinginkan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas yaitu suatu perwujudan kewajiban dari instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawaban.

Menurut Zulkarnain (2002:21) *good Governance* merupakan suatu yang baru bagi masyarakat dimana aplikasi daripada konsep ini sering kali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintahan yang bersih dan demokratis.

7. Konsep Sampah

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Selanjutnya Menurut Undang – Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya pengertian yang sama tentang sampah

menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia.

Sedangkan Menurut Azwar Azrul (1979: 54) pengertian sampah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan industri, tetapi bukan biologis karena human waste tidak termasuk didalamnya.

Pendapat para ahli Sudrajat (2006:15) pengelolaan sampah adalah dikerjakan sedemikian hingga dapat dimanfaatkan, atau diproses sedemikian sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia, maka perlu pengaturan pembuangannya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah yaitu

- a. Penyimpanannya
- b. Pengumpulan
- c. Pembuangan akhir sampah
- d. Pengelolahan sampah

Sampah adalah sesuatu yang tak digunakan , tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia itu dan tidak terjadi dengan sendirinya (Mochtar (1987: 55))

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa golongan, Mochtar (1987: 55), yang didasarkan pada asalnya:

- a. Pasar, tempat – tempat komersial

- b. Pabrik – pabrik atau industri
- c. Rumah tinggal kantor, sekolah, institusi, gedung – gedung umum
- d. Sekolah
- e. Dan lain sebagainya.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan sampah adalah sebagai berikut.

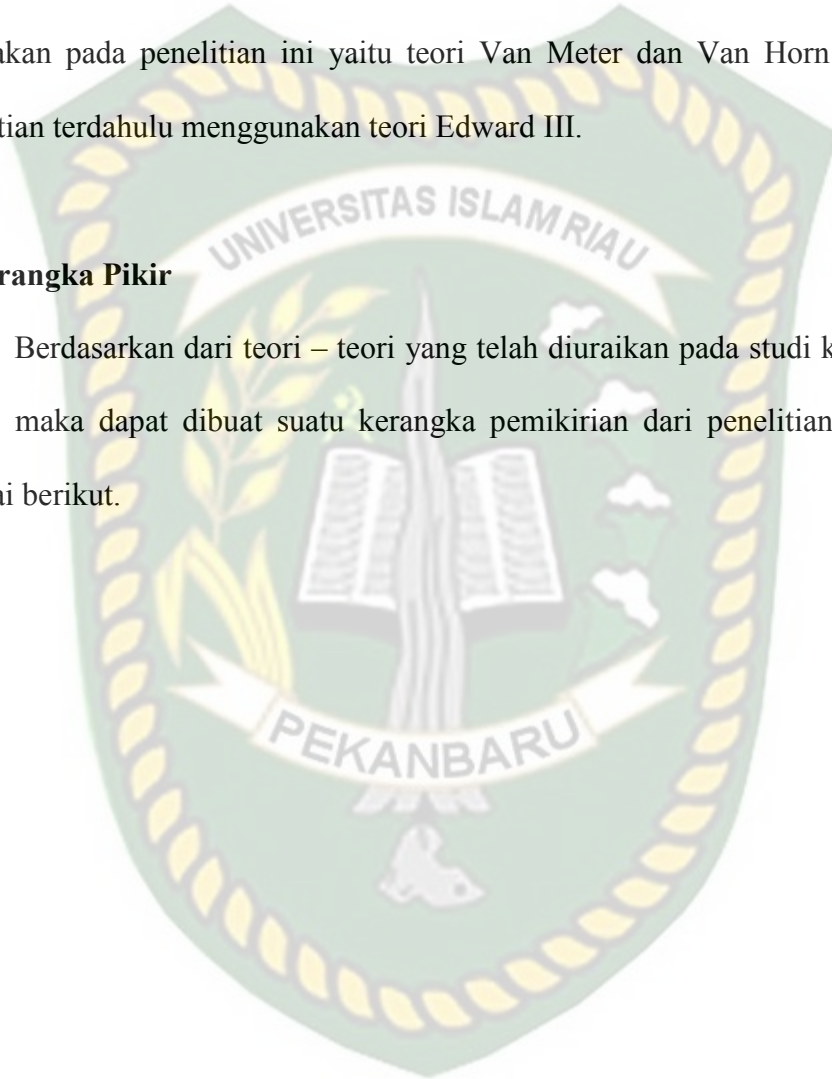
Tabel II. 1: Penelitian Terdahulu

Nama peneliti / tahun	Judul penelitian	Teori dan indikator	Hasil
Dharma Yanti / 2019	Implementasi Pengelolaan Bank Sampah Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Bank Sampah Sekolah)	Teori implementasi indikator kebijakan (Teori Edward III)	Kurangnya armada pengangkut sampah, fasilitas yang belum memadai, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan belum tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah.
Hildawati / 2018	Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Kecamatan di Kota Dumai (studi pasca pelimpahan kewenangan Walikota kepada Kecamatan di bidang persampahan)	Teori evaluasi indikator kebijakan (Teori Edward III)	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti pembagian area kerja yang terkait dengan pengumpulan retribusi, tidak adanya pedoman teknis serta pedoman dan tuntunan pelaksanaan urusan pendelegasian, kurangnya sarana dan prasarana, masih banyaknya keluhan kepada pemerintah kota dumai untuk mengatasi masalah ini tetapi masih belum diatasi.
Murdiringsih / 2014	Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di dinas kebersihan kota Manado	Teori implementasi indikator kebijakan (Teori Edward III)	Belum optimalnya aspek sumberdaya yaitu fasilitas pendukung yakni kendaraan pengangkut sampah serta sarana umum seperti TPS.

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah perbedaan pada fokus permasalahan yang diteliti dan perbedaan teori atau variabel yang diteliti, sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Van Meter dan Van Horn sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori Edward III.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari teori – teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar II. 1 :Kerangka pikir Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020

D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep – konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah atau tempat dijalankannya proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati sebelumnya.
3. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sumberdaya
4. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu diantara alternatif – alternatif yang memungkinkan.
5. Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah Keputusan Bupati Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pengelolaan sampah.
6. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
7. Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah dari TPS ke TPA demi terwujudnya kebersihan di Duri perkotaan Kabupaten Bengkalis.
8. Sumberdaya yang ada dalam Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri yaitu sumber daya uang, sumber daya manusia terdiri dari (pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup, petugas

lapangan pengangkut sampah), dan sumber daya mesin atau peralatan dalam pengangkutan sampah.

9. Karakteristik agen pelaksana struktur birokrasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Duri peerkotaan terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian TU, Staf Pengawas, Staf Koordinasi, Pengawas Satuan Petugas, pegawai – pegawai, dan petugas lapangan pengangkut dan pengelola sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri.
10. Sikap atau kecenderungan “ *Disposition*” para pelaksana kebijakan (Kepala UPT, Kepala Sub Bagian TU, Staf Pengawas, Staf Koordinasi, Pengawas Satuan Petugas, pegawai – pegawai, dan petugas lapangan pengangkut dan pengelola sampah) dalam mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015.
11. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang dilakukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri kepada masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi.
12. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik seperti kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan membayar retribusi sampah.
13. Pihak ketiga (Stakholder) dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu Badan Usaha Milik Desa di Kelurahan Simpang Padang yang mengambil alih juga di Kelurahan Batang Dui, Badan Usaha Milik Desa di Kelurahan

Batin Solapan, Badan Usaha Milik Desa di sebangar, dan Badan Usaha Milik Desa di Kelurahan Pematang Pudu

14. Sampah adalah benda yang tidak dipakai, dibuang, tidak disenangi yang terdiri dari sampah organik dan non organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun – daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah. Sampah jenis ini dapat tergradasi (membusuk atau hancur) secara alami. sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan kaca.
15. Jenis sampah yang diangkut pihak UPT pengelolaan sampah adalah sampah sejenis sampah rumah tangga.
16. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kecamatan Mandau merupakan instansi pemerintahan yang memiliki peran dalam mengurus kebersihan suatu daerah.

Tabel II. 2: Konsep Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Kota Duri Kabupaten Bengkalis.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Implementasi kebijakan adalah merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn ; dalam Wibawa et al., 1994: 19).	Implementasi kebijakan	1. Sumberdaya	a. Jumlah staf dan petugas lapangan b. Jumlah anggaran c. Jumlah sarana dan prasarana
		2. Karakteristik agen pelaksana	a. Adanya kerjasama antar pihak terkait pengelolaan sampah b. Adanya sanksi hukum bagi pelanggar peraturan
		3. Sikap atau kecenderungan “disposition” para pelaksana	a. Adanya pengawasan dalam mengelola sampah b. Kepatuhan petugas pada Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Pemberian insentif (imbalan) / sanksi
		4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana	a. Sosialisasi program kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah b. Media / pola komunikasi
		5. lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	a. kesadaran membuang sampah pada tempatnya b. membayar retribusi sampah

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, berawal dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Menurut Faisal, (1990) penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Model penelitian kualitatif biasanya digunakan di pengamatan dan penelitian sosial. Sugiyono (2016: 9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi disekitar atau peristiwa yang benar – benar terjadi dari suatu objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar.

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis. Alasan pemilihan judul ini karena Pentingnya pengelolaan kebersihan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan serta kepedulian Pemerintah Kota Duri terhadap pengelolaan lingkungan hidupnya.

C. Key Informan dan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang bagaimana latar belakang kondisi penelitian. Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, key informan dalam penelitian ini yaitu kepala UPT. Informan dalam penelitian ini yaitu staf UPT, staf ASN UPT, pengangkut sampah, petugas TPA, supir pengangkut sampah, dan masyarakat

Tabel III. 1: Key Informan dan Informan UPT Pengelolaan Sampah Penelitian Tentang Impelmentasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala UPT	1	1
2	Staf ASN UPT	4	1
3	Staf Administrasi UPT	8	1
4	Pengawas TPA	17	1
5	Pengangkut Sampah	87	4
6	Supir	25	4
Jumlah		142	12

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri, 2020

Tabel III. 2:Informan Masyarakat Penelitian Tentang Impelmentasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1	Blok jalan Hangtuh	705	6
2	Blok jalan Sudirman	169	6
3	Blok jalan Sudirman - Sebangar	1200	6
Jumlah		2074	18

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, dalam Saputra, 2019).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis, Staf ASN UPT, Staf Administrasi UPT, Petugas TPA, Pengangkut Sampah, dan Supir digunakan teknik *purposive sampling*. metode *purposive sampling* adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria – kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.
- b. Untuk masyarakat digunakan teknik penarikan sampel menggunakan penarikan sampel *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, peneliti mengambil 2 informan dari blok Jalan Hangtuh bagian utara, 2 informan di blok Jalan Hangtuh Tengah, dan 2 informan di blok Jalan Hangtuh Barat. Selanjutnya, 2 informan untuk bagian blok Jalan Sudirman Bagian Utara, 2 informan untuk bagian blok Jalan Sudirman Tengah, dan 2 informan untuk Jalan Sudirman Barat. Selanjutnya, 2 informan untuk bagian blok Jalan

Sudirman Sebangar Utara, 2 informan untuk blok jalan Sudirman Sebangar Tengah, dan 2 informan untuk blok jalan Sudirman – Sebangar Barat. bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang penulis peroleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan mengenai pengelolaan sampah. Pengambilan data ini melalui wawancara, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Duri.

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dan kemudian untuk mendukung tujuan penelitian ini, baik melalui studi kepustakaan berupa buku – buku, dokumen maupun data yang diperoleh dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini sehubungan dengan kegiatan – kegiatan mengenai pengelolaan sampah.
2. Wawancara, penulis mengumpulkan informasi dengan cara wawancara dengan responden, penulis menyiapkan penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan secara tertulis tentang pengelolaan sampah yang dijadikan

penulis untuk mewawancarai responden dalam proses pengumpulan data dan informasi.

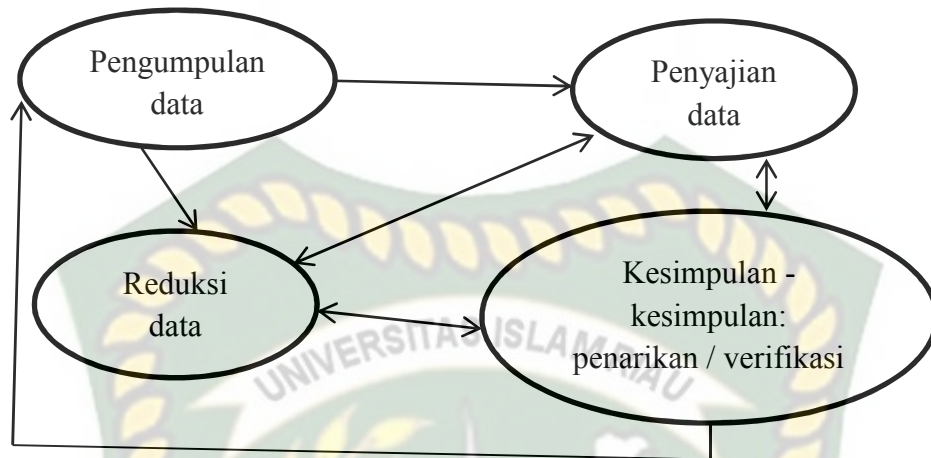
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada peneliti ini dalam bentuk foto, gambaran, dan lain – lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto – foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui alat penelitian berupa daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikumpulkan dan diolah secara kualitatif. Kemudian dipresentasikan dan jelaskan serta dianalisis secara deskriptif sesuai dengan data yang didapat guna menganalisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan tersebut. Terdapat beberapa cara yang biasanya dipilih untuk mengembangkan validitas data penelitian . penelitian ini menggunakan teknik validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.1: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian yang dimulai pada bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel III. 3 dibawah ini:

Tabel III. 3: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis

N O	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke																							
		Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Ujian Proposal						■																		
3	Revisi Proposal											■	■												
4	Kuesioner															■	■								
5	Rekomendasi Survey															■	■								
6	Survey Lapangan																■								
7	Analisis Data																■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																			■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																						■		
10	Ujian Konfrensis Skripsi																							■	
11	Revisi Skripsi																								■
12	Pengandaan Skripsi																								■

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Mandau

Duri adalah Ibu Kota Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Secara geografis kota Duri terletak di Kecamatan Mandau, berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatra, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Duri berbatasan langsung dengan Kecamatan Pinggir di bagian Selatan, Kabupaten Rokan Hulu di bagian Barat, dan berbatasan langsung dengan kota Kecamatan Bukit Batu dan Dumai di bagian Utara.

Kecamatan Mandau terbentang antara 0056'12"LU- 102'17"LU dan 100056'10" BT - 101043'26" BT, dengan ibukotanya di Air Jamban dan Kecamatan ketiga terluas wilayahnya setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu yang mencapai 937,47 Bumbung yang mencapai luas 104 km² atau sebesar 11,09% dari luas total Kecamatan Mandau.

Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km.

Tabel IV.1: Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Kota Duri Kabupaten Bengkalis

No	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)	Desa	Kelurahan
1	Air Jamban	25	2,74		✓
2	Babussalam	8	0,88		✓
3	Balik Alam	6	0,66		✓

Sambungan

4	Batang Sarosa	6	0,66		✓
5	Duri Barat	14	1,53		✓
6	Duri Timur	6	0,66		✓
7	Gajah Sakti	20	2,19		✓
8	Pematang Pudu	25	2,74		✓
9	Talang Mandi	20	2,19		✓
10	Bathin Betuah	11	1,21	✓	
11	Harapan Baru	14	1,53	✓	
12	Sebangar	66,47	7,28	✓	
13	Balai Makam	45	4,93	✓	
14	Petani	80	8,77	✓	
15	Kasumbo Ampai	100	10,96	✓	
16	Tambusai Batang Dui	10	1,10	✓	
17	Simpang Padang	25,47	2,79	✓	
18	Pematang Obo	20	2,19	✓	
19	Air Kulim	60	6,58	✓	
20	Buluh Manis	67	7,34	✓	
21	Boncah Mahang	83,53	9,15	✓	
22	Pamesi	76	8,33	✓	
23	Bathin Sobanga	20	2,19	✓	
24	Bumbung	104	11,40	✓	
	Jumlah	912,47	100%		

Sumber: Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis, 2020.

Kecamatan Mandau terdiri dari 9 Kelurahan dan 15 Desa sehingga jumlah Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau sebanyak 24 Kelurahan/Desa. 9 Kelurahan tersebut diantaranya yaitu: Air jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Sarosa, Duri Batar, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, dan Talang Mandi. Sedangkan 15 Desa tersebut diantaranya yaitu: Bathin Betuah, Harapan Baru, Sebangar, Balai Makam, Petani, Kasumbo Ampai, Tambusai Batang Dui, Simpang Padang, Pematang Obo, Air Kulim, Buluh Manis, Boncah Mahang, Pamesi, Bathin Sobanga, dan Bumbung.

B. Keadaan Umum Kecamatan Mandau

a. Penduduk

Penduduk merupakan sekumpulan orang yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah tertentu. Semakin tingginya jumlah penduduk semakin meningkatnya pembangunan di wilayah tersebut dan semakin meningkat pertumbuhan ekonominya.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Mandau dan bathin solapan yang dibagi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 2: Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Kota Duri Kabupaten Bengkalis.

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	
		Laki – laki	Perempuan
1	Air Jamban	24.334	22.288
2	Babussalam	9.030	8.376
3	Balik Alam	5.567	5.246
4	Batang Sarosa	1.774	1.587
5	Duri Barat	8.985	8.286
6	Duri Timur	5.138	4.589
7	Gajah Sakti	7.520	7.056
8	Pematang Pudu	14.510	13.403
9	Talang Mandi	11.244	10.415
10	Sebangar	5.245	4.816
11	Balai Makam	5.520	5.042
12	Tambusai Batang Dui	6.501	6.003
13	Simpang Padang	7.052	6.590
14	Pematang Obo	3.251	2.916
15	Air Kulim	3.223	3.015
16	Boncah Mahang	5.449	5.126
	Jumlah	143.512	132.260

Sumber: Kantor Camat Mandau, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel IV. 2 diatas, dapat dilihat jumlah penduduk laki – laki berjumlah 143.512 orang dan jumlah penduduk perempuan 132.260 orang. Dari tabel diatas dapat disimpulkan jumlah penduduk laki – laki lebih banyak daripada

jumlah penduduk perempuan. Kecamatan Mandau, khususnya Duri perkotaan merupakan salah satu wilayah yang berkembang pesat dalam semua aspek terutama sektor industri ekonomi dan penduduk. Berdasarkan populasi penduduk tersebut Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Pinggir mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak di Kabupaten Bengkalis sehingga memiliki potensi timbulan sampah yang tinggi.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah, semakin berkembangnya pendidikan pada suatu daerah semakin baik kualitas sumber daya manusianya sehingga meningkatkan pertumbuhan pembangunan daerah tersebut. Berikut ini jumlah penduduk Kecamatan Mandau berdasarkan Pendidikan:

Tabel IV. 3: Jumlah Sekolah Berdasarkan Pendidikan di Kota Duri Kabupaten Bengkalis

No	Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	TK	67
2	SD	103
3	SMP	29
4	SMA	17
5	SMK	7
6	Madrasah Ibtidaiyah	16
6	Madrasah Tsanaliyah	14
8	Madrasah Aliyah	8
9	SLB	2
10	MDA	815
11	Pondok Pesantren	43

Sumber: Kantor Camat Mandau, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat diantaranya TK berjumlah 67 sekolah, SD berjumlah 103 sekolah, SMP berjumlah 29 sekolah, SMA berjumlah

17 sekolah, SMK berjumlah 7 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 16 sekolah, Madrasah Tsanaliyah berjumlah 14 sekolah, Madrasah Aliyah berjumlah 8 sekolah, SLB berjumlah 2 sekolah, MDA berjumlah 815 sekolah dan Pondok Pesantren berjumlah 43 sekolah.

c. Ekonomi

Dalam sektor ekonomi, perkebunan merupakan sektor pertanian terbesar di kota Duri. produktivitas karet mencapai 21. 782 ton dan produktivitas kelapa sawit mencapai 619.958 ton.

Industri memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat di kota Duri. tercatat ada 3 industri besar dan 5 industri menengah di Kota Duri. sementara itu ada 104 unit industri kecil dan 322 unit industri mikro. Selain itu sektor perdagangan juga menjadi penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar Provinsi dan Kabupaten, kota Duri memiliki sarana perdagangan dan akomodasi yang terbilang relatif banyak.

Tabel IV. 4: Sektor Perdagangan di Kota Duri Kabupaten Bengkalis

No	Sarana Perdagangan	Jumlah
1	Swalayan/supermarket/ toserba/ minimarket	15
2	Toko / warung kelontong	2359
3	Pasar permanen	7
4	Pasar tidak permanen	6
5	Restoran / rumah makan	202
6	Warung / kedai makan minum	1769
7	Losmen / wisma / motel	5
8	Hotel	7
9	SPBU	2

Sumber: Kantor Camat Mandau, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Swalayan/supermarket/ toserba/ minimarket berjumlah 15 tempat, Toko / warung kelontong berjumlah 2359 tempat, pasar permanen berjumlah 7 tempat, pasar tidak permanen berjumlah 6 tempat, restoran /rumah makan berjumlah 202 tempat, warung / kedai makan minum berjumlah 1769 tempat, losmen/ wisma /motel berjumlah 5 tempat, hotel berjumlah 7 buah, dan SPBU berjumlah 2 tempat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Duri Perkotaan hal ini mengakibatkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat sehingga menyebabkan banyaknya potensi timbulan sampah.

C. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau merupakan turunan bagian dari Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. UPT Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau diberikan tugas/wewenang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis untuk mengurus kebersihan di Kota Duri.

Visi Kecamatan Mandau

Visi Kecamatan Mandau yaitu:

- 1) Pemerintahan Yang Berwibawa
- 2) Pemerintah yang transparan
- 3) Pemerintah yang bertanggung jawab

Misi Kecamatan Mandau

Misi Kecamatan Mandau sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan.
- 2) Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good Government).
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan.

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

- a. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan pengelolaan sampah di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program Kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/ residu dari sumber sampah ke TPS dan/ atau TPS 3R ke Kabupaten.
- c. Melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan TPSR ke TPA dan/atau TPST Kabupaten.
- d. Melaksanakan pengolahan sampah (Pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).

- e. Melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas).
- f. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS 3R, TPA dan/ atau TPST Kabupaten.
- g. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten.
- h. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten.
- i. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan Personil UPT Pengelolaan Sampah.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Berikut ini bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Kelas A Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017

Gambar IV. 1: Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau



Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri, 2020.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan wawancara. Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena didalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis, jadi data – data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari pegawai UPT pengelolaan sampah dan petugas pengelola sampah berjumlah 12 orang dan masyarakat berjumlah 18 orang dengan melakukan wawancara.

Sehubung dengan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

1. Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin

Dari hasil penelitian implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut.

Tabel V. 1: Klasifikasi Responden UPT Pengelolaan Sampah Dan Petugas Pengelola Sampah berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah responden	Presentase (%)
1	Laki – laki	10	83,3%
2	Perempuan	2	16,7%
Jumlah		12	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian UPT pengelolaan sampah dan petugas pengelola sampah yang di jadikan sampel dalam penelitian implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis adalah dominan laki – laki dengan jumlah 10 orang (83,3%). Dan jumlah responden perempuan berjumlah 2 orang (16,7%) dan total keseluruhan 12 orang responden UPT pengelolaan sampah dan petugas pengelola sampah.

Tabel V. 2: Klasifikasi Responden Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah responden	Presentase (%)
1	Laki – laki	9	50%
2	Perempuan	9	50%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian masyarakat laki – laki berjumlah 9 orang (50%) dan masyarakat perempuan berjumlah 9 orang (50%). Peneliti mengambil sampel responden masyarakat laki laki dan perempuan di blok hangtuh (hangtuh bagian utara, tengah, selatan) sebanyak 3 orang laki – laki dan 3 orang perempuan. sampel responden masyarakat di blok sudirman (sudirman utara, tengah, selatan) sebanyak 3 orang laki – laki dan 3 orang perempuan. Dan sampel responden masyarakat di blok sudirman-sebangan (sudirman-sebangan utara, tengah, selatan) sebanyak 3 orang laki – laki dan 3 orang perempuan. Total keseluruhan responden masyarakat sebanyak 18 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil penelitian implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan umur adalah sebagai berikut.

Tabel V. 3: Klasifikasi Responden UPT Pengelolaan Sampah Dan Petugas Pengelola Sampah Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah responden	Presentase (%)
1	≤ 25 Tahun	-	-
2	25-39 Tahun	8	66,7%
3	40-49 Tahun	3	25%
4	≥ 50 Tahun	1	8,3%
Jumlah		12	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian UPT pengelolaan sampah dan petugas pengelola sampah yang di jadikan sampel dalam

penelitian implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis adalah dominan umur 25-39 tahun dengan jumlah responden sebanyak 8 orang (66,7%), responden umur 40-49 sebanyak 3 orang (25%) dan responden umur diatas 50 tahun 1 orang (8.3%). Total keseluruhan 12 orang.

Tabel V. 4: Klasifikasi Responden Masyarakat Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah responden	Presentase (%)
1	≤ 25 Tahun	-	-
2	25-39 Tahun	11	60%
3	40-49 Tahun	6	26,7%
4	≥50 Tahun	2	13,3%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden masyarakat terbesar adalah antara usia 25-39 Tahun. Dengan jumlah 11 orang atau sekitar 60%.Kemudian untuk responden umur 40-49 tahun sebanyak 6 orang atau sekitar 26,7% dan selebihnya umur 50 tahun keatas sebanyak 2 orang atau sekitar 13,3%.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel V. 5: Klasifikasi Responden UPT Pengelolaan Sampah Dan Petugas Pengelola Sampah Berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1	SD	-	-
2	SMP	2	16,7%
3	SMA	6	50%
4	DIPLOMA	1	8,3%
5	SARJANA (S1)	2	16,7%
6	PASCA SARJANA (S2)	1	8,3%
Jumlah		12	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden UPT pengelolaan sampah dan petugas pengelola sampah SMP sebanyak 2 orang sekitar 16,7%. Responden terbesar adalah SMA sebanyak 6 orang atau sekitar 50%. Selanjutnya untuk jenjang Diploma sebanyak 1 responden atau sekitar 8,3% dan untuk jenjang pendidikan sarjana (S1) sebanyak 2 responden atau sekitar 16,7%.

Tabel V. 6: Klasifikasi Responden Masyarakat Berdasarkan Target Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	10	55,6%
4	DIPLOMA	5	27,7%
5	SARJANA (S1)	2	11,1%
6	PASCA SARJANA (S2)	1	5,6%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden masyarakat dominan adalah SMA sebanyak 10 orang (55,6%), pendidikan DIPLOMA sebanyak 5 orang (27,7%), pendidikan SARJANA (S1) sebanyak 2

orang (11,1%) dan pendidikan PASCA SARJANA (S2) sebanyak 1 orang (5,6) .
total keseluruhan responden adalah 18 orang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis

Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis adalah berdasarkan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam (Wibawa et al., 1994: 19). dan indikator – indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini adalah sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, Sikap atau Kecenderungan “ *Disposition*” Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Dan didalam indikatornya akan dilengkapi dengan tiap – tiap sub indikator yang berguna sebagai alat yang menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil penelitian. Untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu indikator sumberdaya maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan di UPT pengelolaan sampah Kota Duri dan masyarakat Kota Duri.

1. Sumberdaya

Menurut Pakar Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2014; 141-144) Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan

sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan ada sumberdaya manusia. Diluar sumberdaya manusia terdapat sumberdaya lain yang dapat diperhitungkan juga, yaitu sumberdaya uang (*financial*), sumberdaya sarana dan prasarana, dan sumberdaya waktu.

Untuk melihat bagaimana kualitas dari sumberdaya tersebut dapat dilihat dari jumlah staf dan petugas pengelola sampah di UPT pengelolaan sampah tersebut, anggaran, dan sumberdaya sarana dan prasarana seperti mobil pengangkut sampah, TPS, dan TPA.

1.1 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya utama untuk menjalankan suatu proses kebijakan adalah sumberdaya manusia (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah staf yang tidak memadai atau mencukupi, ataupun tidak ahli dalam bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT pengelolaan sampah mengenai ketersediaan sumberdaya manusia tersebut, ia mengatakan bahwa:

“Jumlah staf dan jumlah petugas pengelola sampah di lapangan yang ada di UPT Kecamatan Mandau pengelolaan sampah belum memadai dan secara kualitas belum efektif. Jika Pemerintah menambah orang hal ini tergantung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis jika ada anggaran yang berlebih bisa menambah petugas pengelola sampah”.
(Bapak Nofrizon, Rabu, 23 Desember 2020).

Mengenai masalah sumberdaya manusia penulis juga melakukan wawancara dengan Staf selaku bagian Administrasi yang mengatakan bahwa:

“Jumlah staf dikantor dan petugas pengelola sampah dilapangan belum memadai dan kualitas dari petugas pengangkut sampahnya masih kurang.” (Ibu Wulan, Senin, 21 Desember 2020).

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perlunya sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten guna tercapainya proses suatu kebijakan yang dibuat. kurangnya petugas pengelola sampah dan masih banyak sampah yang belum terangkut. Permasalahan sumberdaya manusia dalam penelitian ini masih belum cukup.

1.2 Sumberdaya Anggaran

Menurut ahli Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014: 134), sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan ialah sumberdaya finansial. Karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia , maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT pengelolaan sampah mengenai ketersediaan sumberdaya anggaran tersebut, ia mengatakan bahwa:

“Untuk anggaran yang sudah di realisasikan pihak UPT pengelolaan sampah Kecamatan Mandau tidak bisa berbicara anggaran, karena semua anggaran disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Hasil retribusi yang di dapat dari masyarakat langsung diserahkan ke BAPEDA (Badan Pendapatan Daerah) dan diserahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.” (Bapak Nofrizon, Rabu, 22 Desember 2020).

Mengenai masalah sumberdaya anggaran, peneliti juga mewawancari Staf selaku bagian Adminstrasi yang mengatakan bahwa:

“Anggaran yang disediakan pemerintah saat ini masih kurang. jika UPT memerlukan anggaran dana operasional seperti kertas, kop surat, map, dan kerusakan kendaraan pengangkut sampah, pihak UPT menggunakan uang pribadi dahulu nanti setiap jangka 3 bulan atau diakhir tahun baru diganti oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis karena UPT pengelolaan sampah Kecamatan Mandau tidak ada bendaharawan untuk mengelola keuangan.” (Ibu Wulan, Senin, 21 Desember 2020).

Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan sumberdaya anggaran dalam penelitian ini yaitu masih minimnya anggaran yang disediakan pemerintah sehingga terhambatnya realisasi tujuan kebijakan yang dibuat. Anggaran yang disediakan pemerintah hanya 200 juta untuk 24 Kelurahan di Kota Duri. anggran tersebut tidak cukup untuk menambah armada pengangkut sampah serta sarana dan prasarana pengangkut sampah.

1.3 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. implementator mungkin mempunyai jumlah staf yang memadai, mengerti apa yang harus dilakukan , dan memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Terbatasnya jumlah kendaraan operasional yang disediakan pemerintah untuk kota Duri dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.7: Data Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Kota Duri 2019

No	Jenis	Type	Kapasitas (Ton)	Kondisi	Area Pelayanan
1	Dump Truck (Toyota)	Dyna	9	Kurang Baik	Hangtuah, Pasar Sartika
2	Dump Truck (Toyota)	Dyna	11	Kurang Baik	Pasar, Hangtuah, Sudirman
3	Dump Truck (Toyota)	Dyna	9	Kurang Baik	Bathin Solapan, Pasar Sartika
4	Dump Truck (Toyota)	Dyna	11	Kurang Baik	Sebanga, Sudirman
5	Dump Truck (Hyundai)	125 MH	9	Kurang Baik	Sudirman
6	Dump Truck (Hino)	130 MD	7	Kurang Baik	Sudirman
7	Amroll (Toyota)	Dyna	-	Rusak	-
8	Amroll (Toyota)	Dyna	6	Kurang Baik	Sudirman, Jalan Rangau
9	Amroll (Toyota)	Dyna	-	Rusak	-
10	Amroll (Toyota)	Dyna	8	Kurang Baik	Jl Jawa, Jl Pipa Air Bersih, Batin Solapan, Sebangau
11	Amroll (Toyota)	Dyna	5	Baik	Sudirman
12	Pick Up (Toyota)	Hilux	1,5	Kurang Baik	Desa Harapan, Sudirman
13	Pick Up (Toyota)	Hilux	1	Kurang Baik	Sudirman, Hangtuah
14	Triseda (Caisar)	Betor	0,4	Kurang Baik	Sudirman
15	Triseda (Caisar)	Betor	-	Rusak	-
16	Triseda (Caisar)	Betor	-	Rusak	-

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri, 2020.

Berdasarkan tabel V. 7 diatas, jumlah sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang kondisinya baik hanya 1 dan jumlah kendaraan yang kurang baik ada 11 kendaraan sedangkan kendaraan yang rusak ada 4 kendaraan. Armada pengangkut sampah di UPT ini hanya beroperasi di sekitar protokol Jalan Kota Duri. Armada pengangkut sampah melakukan pengangkutan setiap hari. Dalam sehari armada bisa mengangkut sampah 2 rit untuk kendaraan yang kapasitas kecil, 3 rit untuk kendaraan yang berkapasitas sedang dan 4 rit untuk kendaraan yang berkapasitas besar. Rute armada pengangkut sampah wilayah kerja Kecamatan Mandau yaitu mulai dari Jalan Lintas Duri – Dumai lalu ke Jalan Sudirman, Hangtuah hingga Jalan Lintas Duri – Pekanbaru. Armada pengangkut sampah bekerja dari jam 06.00 WIB hingga jam 20.00 WIB.

Keterbatasan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga menjadi permasalahan yang menyebabkan banyak masyarakat yang sulit untuk menemukan tempat pembuangan sampah terdekat disekitarnya.

Tabel V. 8: Data Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Mandau

Nomor	TPS	Jumlah
1	Talang Mandi	1
2	Jalan Sebangar	1
3	Jalan Jawa	1
4	Jalan Rangau	1
5	Pasar Mandau Raya	1
Total		5

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri, 2020.

Dari tabel V.8 diatas dapat dilihat Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau bak yang telah disediakan oleh pemerintah, berjumlah 5 titik yaitu, di Talang Mandi, Jalan Sebangar, Jalan Rangau, dan pasar Mandau Raya. TPS yang

disediakan hanya berada di pusat – pusat Kecamatan. TPS yang disediakan pemerintah ini sangat kurang untuk menampung sampah rumah tangga Kota Duri yang terdiri dari 24 Kelurahan atau Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari kepala UPT pengelolaan sampah mengenai ketersediaan sumberdaya sarana dan prasarana tersebut, ia mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana seperti TPS dan TPA masih cukup, tetapi untuk kendaraan pengelola sampah masih kurang yang disediakan pemerintah untuk Duri kota. Petugas hanya mengangkut sampah di sepanjang protokol jalan Duri perkotaan setiap hari 1 kali sehari karena kurangnya kendaraan sehingga masyarakat yang ingin membuang sampahnya harus mengantarkan ke TPS yang sudah disediakan.” (Bapak Nofrizon, Rabu, 22 Desember 2020).

Selanjutnya, penulis juga melakukan observasi mengenai sumberdaya sarana dan prasarana turun kelapangan langsung mewawancarai masyarakat yang tinggal di ruko pinggir jalan di blok Sudirman yang ikut iuran retribusi sampah. Ia mengatakan bahwa:

“Tong sampah dan TPS yang disediakan pemerintah masih kurang. Dan kadang masyarakat yang tinggal di dalam gang atau jalan – jalan kecil itu membuang sampah sembarangan di tepi jalan raya dan ada yang membuang sampah di ruko atau lahan yang tidak ada penghuninya karena TPS tersebut jauh. Petugas pengangkut sampah mengangkut sampah setiap hari hanya 1 kali sehari. Jika sampah di TPS sudah penuh petugas pengawas TPS kadang melarang masyarakat membuang sampah di TPS itu karena sampah tersebut tidak bisa diangkut lagi ke kendaraan pengangkut sampah. Pengawas mengarahkan masyarakat untuk membuang sampahnya ke TPS lain yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal warga” (Ibu Rina, Sabtu, 26 Desember 2020).

Jika dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan

bahwa permasalahan sumberdaya mobil pengangkut sampah yang membuat lambatnya kinerja armada pengangkutan sampah dan dari pihak masyarakat kurangnya TPS yang disediakan pemerintah dan TPS yang ada pun jauh dari permukiman dan tidak adanya bak sampah yang tersedia di sekitar protokol jalan Duri perkotaan. Hal ini dikarenakan kurangnya dana atau anggaran yang disediakan pihak Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sehingga mengakibatkan masih banyaknya sampah yang belum terangkut.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2014; 141-144) berpendapat bahwa kinerja implementasi kebijakan “publik” akan banyak dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini dapat dimaknai bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Duri didukung dengan karakteristik agen pelaksana (struktur birokrasi) maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat terlaksana secara efektif dan rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Dalam konteks penelitian ini karakteristik agen pelaksana dapat dilihat dari adanya kerjasama antar pihak terkait pengelolaan sampah dan adanya sanksi hukum bagi pelanggar peraturan.

2.1 Adanya Kerjasama Antar Pihak Terkait Pengelolaan Sampah

Dalam hal guna mencapai tujuan kebijakan perlu cakupan implementasi kebijakan yang luas, maka seharusnya semakin besar pula agen yang terlibat.

Pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini pihak UPT pengelolaan sampah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan adanya Bank Sampah yang terdapat di Kelurahan Pematang Pudu dan di Kelurahan Desa Petani. berdasarkan data capaian pengelolaan sampah tahun 2019 yaitu:

Tabel V. 9: Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2019

N o	Kecamat an	Volume Sampah	Terangku t Ke TPA	Terkurangi Di Sumber*	Total Pengelolaa n	%
1	Mandau	28.915,14	13.785,32	5.349,30	19.134,62	66,18 %
2	Bathin Solapan	13.644,65	5.990,75	2.524,26	8.515,01	62,41 %

Sumber: LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan data tabel V.9 diatas volume sampah di Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Bathin Solapan cukup besar, tidak sebanding dengan volume sampah yang terangkut ke TPA.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah terkait kerjasama antar pihak terkait pengelolaan sampah yang mengatakan bahwa:

“UPT pengelolaan sampah dalam mengangkut sampah Duri kota bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan bank – bank sampah. sampah – sampah yang diangkut oleh petugas pengangkut sampah di TPS dan dibawa ke TPA kemudian dilakukan pemilahan oleh pemulung atau pihak dari bank sampah supaya bisa diolah menjadi barang yang bisa dijual. Dalam pengelolaan sampah ini pasti ada pembagian blok kerja yang dilaksanakan oleh masing – masing petugas pengelola sampah yang terdiri dari 24 rute disekitar protokol jalan Kota Duri, supir pengangkut sampah ada 26 orang yang mempunyai anggota 81 orang.” (Rabu, 23 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepala UPT pengelolaan sampah kemudian penulis melakukan observasi langsung ke lapangan yaitu ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) terlihat banyak tumpukan sampah yang sudah menggunung dan tidak ada aktivitas pemilahan sampah dan pendauran pengelolaan sampah yang dilakukan di sekitar TPA. Ada beberapa supir pengangkut sampah yang baru siap mengangkut sampah dari TPS. Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang supir yang mengatakan bahwa:

“Sampah – sampah masyarakat Duri perkotaan diangkut oleh petugas pengangkut sampah dari UPT dan juga pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sampah – sampah yang diangkut dibuang ke TPA dan dibiarkan begitu saja. Tidak ada proses pemilahan atau daur ulang yang dilakukan dari UPT pengelolaan sampah maupun Bank sampah kota Duri. Kalaupun ada yang memilah itu hanya pemulung yang mencari sisa – sisa makanan untuk ternaknya dan mencari botol plastik yang bisa dijual kembali ke pengepul sampah.” (Bapak Iskandar Selasa, 22 Desember 2020).

Jika dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari responden dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahannya yaitu tidak adanya program dalam pengurangan potensi timbulan sampah dan tidak adanya kerjasama yang dilakukan Dinas terkait dengan bank sampah yang ada di Kota Duri. Sampah yang diangkut dari rumah masyarakat dan TPS sampai di TPA hanya dibiarkan begitu saja, tidak ada proses selanjutnya yang dilakukan berupa pemilahan hingga proses sampah itu kembali.

2.2 Adanya Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Peraturan

Implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Implementasi kebijakan publik

yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam menjalankan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala UPT pengelolaan sampah mengenai sub indikator adanya sanksi hukum bagi pelanggar peraturan, beliau menjelaskan bahwa:

“Sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan ada dalam Peraturan Daerah Bengkalis No 2 Tahun 2015, meskipun ada sanksi masyarakat tidak jera dan masih tidak peduli banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum dan masih membuang sampah sembarangan”. (Bapak Nofrizon, Rabu, 23 Desember 2020).

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sanksi yang diberikan kepada masyarakat tentang larangan membuang sampah pun tidak tegas berupa larangan atau teguran sehingga masyarakat tidak takut untuk membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat dilihat dari dokumentasi foto yang peneliti ambil di tepi jalan lintas kota Duri.

3. Sikap atau Kecenderungan “Disposition” para pelaksana

Kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. (dalam Agustino 2014; 141-144). Berhasilnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Duri Kabupaten Bengkalis dapat ditentukan dari perilaku dan sikap yang ada pada para pelaksana,

dalam hal ini pegawai atau staf yang mendapatkan tupoksi untuk mengelola sampah dan petugas yang secara langsung melakukan proses pengelolaan sampah. Para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah tersebut adalah pegawai yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya dan sungguh – sungguh karena para pelaksana akan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah untuk kepentingan umum. Selain itu pegawai atau petugas yang menjalankan kebijakan pengelolaan sampah juga terkait dengan masalah insentif (imbalan) dan sanksi yang diberikan jika pegawai dan petugas yang melanggar Standar Operational Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

3.1 Adanya Pengawasan dalam Mengelola Sampah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala UPT pengelolaan sampah mengenai sub indikator pengawasan dalam mengelola sampah beliau menjelaskan bahwa:

“Setiap hari pengawas selalu memantau kinerja dari armada pengangkut sampah sampai sampah tersebut dibawa ke TPA.” (Bapak Nofrizon, Rabu, 23 Desember 2020).

Hal ini bertolak belakang dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu supir pengangkut sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pasar Dewi Sartika yang mengatakan:

“Armada lainnya sudah bekerja sesuai dengan tupoksi dan mengenai pengawasan kinerja, tidak pernah ada pengawasan yang dilakukan pengawas dari UPT pengelola sampah baik pemantauan langsung di TPS – TPS, sampai sampah yang diangkut ke TPA. Di TPA hanya ada security, operator alat berat, dan kami petugas pengangkut sampah.” (Bapak Iskandar, Selasa, 22 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat perbedaan pendapat. Sikap UPT pengelolaan sampah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang terdapat dalam BAB XV Pasal 51 bagian ke 2 tentang pembinaan dan pengawasan yang mengatakan bahwa dinas harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Bupati. Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri atau bersama – sama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dan hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya sikap pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT pengelola sampah terkait dalam pengelolaan sampah yang dilakukan petugas.

3.2 Kepatuhan Petugas pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

Salah satu karakteristik menurut Edward III (dalam Agustino 2014, 141) yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan – kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas pengangkut sampah di UPT dinas lingkungan hidup kota Duri Kabupaten Bengkalis:

Tabel V.10 : Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas pengangkut sampah di UPT dinas lingkungan hidup kota Duri Kabupaten Bengkalis

No	Standar Operational Prosedur (SOP) petugas pengangkut sampah
1	Menentukan lokasi / titik pengumpulan sampah (TPS dan Tumpukan Sampah pada Jalur/Rute)
2	Berdasarkan data lokasi pengumpulan, membuat data petugas, jalur/ rute, jadwal ritasi pengambilan dan kebutuhan BBM.
3	Melaksanakan Pengisian BBM pada armada angkutan sampah.
4	Melaksanakan pengecekan kondisi armada dan armada dalam kondisi engine hidup serta kelengkapan APD Petugas Angkutan Sampah.
5	Melaksanakan tugas pe ngangkutan sampah sesuai dengan jalur / wilayah yang sudah ditentukan.
6	Mengirimkan laporan kondisi sebelum dan sesudah pembersihan dan pengangkutan ke Mandor
7	Mengirimkan hasil pengangkutan sampah ke TPA
8	Melaksanakan kegiatan pembersihan armada dan kesiapan armada untuk kegiatan besok hari.
9	Menuju ke garasi.
10	Selesai.

Sumber: UPT dinas lingkungan Hidup kota Duri, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala UPT pengelolaan sampah mengenai sub indikator kepatuhan petugas pada Standar Operasional Prosedur (SOP) beliau menjelaskan bahwa:

“Pihak UPT sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, baik itu pegawai, staf, dan petugas dilapangan yang mengelola dan mengangkut sampah. Petugas pengangkut sampah bekerja setiap hari untuk mengangkut sampah masyarakat di Kota Duri, kalau mereka tidak mengangkut sampah 1 hari saja masyarakat bisa marah dan sampah tersebut makin menumpuk. Tetapi kekurangan sumberdaya membuat petugas pengangkutan sampah membuat petugas tidak menjalankan SOP dengan benar.” (Bapak Nofrizon, Rabu, 23 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa fakta – fakta yang terungkap sejalan

dengan faktor Sikap atau Kecenderungan “Disposition” Para Pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Duri Kabupaten Bengkalis. Pegawai UPT dan Petugas Pengelola Sampah sudah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Tetapi keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas.

3.3 Pemberian Insentif (imbalan) atau Sanksi

Menurut Edward III (dalam Agustino 2014, 140) menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan cara menambahkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala UPT pengelolaan sampah mengenai sub indikator pemberian insentif (imbalan) atau sanksi, beliau mengatakan:

“Untuk pemberian insentif (imbalan) ada, upah atau gaji untuk pegawai diberikan setiap 1 bulan sekali dan reward yang diberikan jika kinerja dari petugas pengelola sampah itu bagus yaitu berupa pengangkatan / kenaikan jabatan. Sanksi bagi yang melanggar SOP yaitu pemotongan upah gaji.” (Bapak Nofrizon, Rabu 23 Desember 2020).

Mengenai sub indikator pemberian insentif (imbalan) atau sanksi, peneliti melakukan wawancara dengan petugas pengangkut sampah ia mengatakan:

“Upah atau gaji yang diberikan pemerintah tidak mencukupi karena pekerjaan petugas pengangkut sampah berat. Kadang petugas pengangkut sampah bekerja lewat dari waktu bekerja karena banyaknya sampah yang harus diangkut ke TPA. Pemerintah tidak pernah memberikan reward kepada petugas yang bekerja. Dan sanksi yang diberikan jika melanggar SOP yaitu pemotongan gaji.” (Bapak Hatta, Selasa, 22 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perlunya pemberian insentif /reward untuk memotivasi kinerja petugas pengelola sampah dalam supaya mendorong pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Dengan adanya hal tersebut petugas pengelola sampah bisa lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya.

4. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktifitas Pelaksana

Pendapat Edward III (1980, dikutip dalam Agustino 2008: 150) Komunikasi yang baik merupakan salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sasaran kebijakan akan terwujud apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan yang diimplementasikan bisa dikoordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus akurat dan konsisten.

Dalam konteks penelitian ini komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dapat dilihat dari Sosialisasi program kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, Media / pola komunikasi dan Tata kerja (mekanisme).

4.1 Sosialisasi Program Kepada Masyarakat Mengenai Pengelolaan Sampah

Sosialisasi merupakan salah satu cara mendistribusikan pelbagai hal yang dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasinya. Tanpa sosialisasi yang baik, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai.

Untuk mengetahui kebijakan yang dibuat apakah sudah terlaksana dengan baik perlunya upaya sosialisasi dilakukan ke masyarakat agar masyarakat kota Duri tahu adanya aturan yang melarang masyarakat membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala UPT pengelolaan sampah mengenai komunikasi secara sosialisasi yang dilakukan pihak UPT tersebut, ia mengatakan bahawa:

“Pihak UPT melakukan sosialisasi kadang jika ada yang datang ke kantor sambil ada yang berurusan pihak UPT melakukan sosialisasi. Sosialisasi diatur melalui perencanaan dan perencanaan melalui anggaran. Jika ada anggaran barulah UPT bisa melakukan sosialisasi. Kadang sosialisasi dilakukan langsung oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan pihak UPT hanya sebagai pendamping. baru – baru ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis ada melakukan sosialisasi ke UPT Pengelolaan Sampah yang sosialisasinya diutamakan untuk pemulung. Pihak pengangkut sampah pun pada saat mereka bekerja mengangkut sampah masyarakat, mereka mengelompokkan sampah tersebut untuk dijual. Sampah tersebut di jual ke Bank Sampah yang ada di Kelurahan Pematang Pudu dan Kelurahan Batin Solapan supaya bisa dijadikan uang.” (Bapak Nofrizon, Rabu 23 Desember 2020).

Selanjutnya terkait sosialisasi penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat di blok sudirman-sebangan yang mengatakan bahawa:

“Sosialisasi dari UPT Pengelolaan Sampah tidak pernah ada di kelurahan Duri Barat, gotong royong juga jarang dilakukan, hanya 1 kali per 3 bulan itupun tidak rutin dilaksanakan hanya antar RW dan kesadaran masyarakat untuk membersihkan lingkungannya, masyarakat tidak tahu kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Kota Duri ini dan adanya Bank sampah di Kota Duri ini.” (Bapak Amir, Sabtu 26 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan jawaban dari responden bahwa mengenai komunikasi tidak ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai program pengelolaan sampah dan tidak ada gotong royong yang dilakukan di setiap Kelurahan, hanya gotong royong berdasarkan swadaya masyarakat dan berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat banyak yang tidak tau dengan adanya bank sampah di Duri perkotaan.

4.2 Media / Pola Komunikasi

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi adalah Transmisi “penyalur komunikasi”, yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Yang sering kali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi yaitu adanya miskomunikasi sehingga kebijakan yang dibuat dengan sedemikian rupa terditorsi saat sampai pada posisi tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT pengelolaan sampah mengenai komunikasi secara sosialisasi yang dilakukan pihak UPT tersebut, ia mengatakan bahawa:

“pola komunikasi yang digunakan dalam mengsosialisasikan program pengelolaan sampah yaitu dengan cara pihak Kepala UPT pengelola sampah Kecamatan Mandau melakukan sosialisasi kunjungan ke Desa dengan cara mengundang RT/RW, Masyarakat, Ibu – ibu PKK seperti di Desa Simpang Padang, Batang Dui, dan Desa Balai Makam.” (Bapak Nofrizon, Rabu 23 Desember 2020).

Hal ini bertolak belakang dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu masyarakat di blok Hangtuh yang mengatakan:

“pihak dinas tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai sampah di Kelurahan Duri Barat. spanduk dijalanan dulu pernah ada. Tetapi

sekarang tidak pernah lagi terlihat spanduk larangan membuang sampah sembarangan.” (Ibu Yuni, Senin, 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi lapangan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah belum merealisasikan tupoksi dan tanggung jawabnya sebagaimana yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah pada BAB IV Pasal 6 bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Untuk menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter Dan Van Horn (dalam Agustino 2008: 150) lingkungan ekonomi sosial dan politik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Ada 2 sub indikator untuk dalam lingkungan ekonomi sosial dan politik yaitu kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan membayar retribusi sampah.

5.1 Kesadaran Membuang Sampah pada Tempatnya

Kebiasaan membuang sampah sembarangan jika dibiarkan dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang berbahaya. Sehingga perlunya kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala UPT pengelolaan sampah Kecamatan Mandau mengenai sub indikator kesadaran membuang sampah pada tempatnya, ia mengatakan bahwa:

“Perlunya peran penting masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Masyarakat bisa menabung di bank sampah dengan cara memilah sampah mana yang bisa dijual seperti sampah plastik, botol, atau kaleng bekas. Hal ini bisa membantu masyarakat dari segi ekonomi. Dan sampah – sampah lainnya yang tidak bisa dijual baru dibuang ke TPS terdekat. Dengan cara seperti itu maka volume sampah bisa berkurang.” (Bapak Nofrizon, Rabu, 23 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa peran masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat juga wajib menjaga atau memelihara lingkungan sekitarnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 pasal 10 yaitu setiap orang berkewajiban memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan tempat tinggal / tempat berusaha; memelihara dan menjaga kebersihan saluran air waduk, situ, kolam, dan sungai yang terletak di lokasi atau sempadan tempat tinggal atau tempat berusaha; mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

5.2 Membayar Retribusi Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pada pasal 7 retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah sebagai berikut.

Tabel V.11 : Data Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di Kecamatan Mandau.

a. Tarif per hari

No	Jenis prasarana/kegiatan	Tarif
1	Kios / ios / toko didalam pasar	Rp 3.000
2	Toko / usaha diluar pasar / dijalan umum	Rp 3.000
3	Berdagang / berjualan dengan gerobak dorong dihalaman / pelataran pasar / ruko	Rp 3.000
4	Berdagang atau berjualan dihalaman / pelataran pasar	Rp 3.000
5	Berdagang / berjualan dengan gerobak dorong diluar halaman / pelataran pasar / ruko	Rp 3.000

b. Tarif per bulan

No	Jenis prasarana/kegiatan	Tarif
1	Kios / toko didalam pasar	Rp 30.000
2	Toko / usaha diluar pasar / ditepi jalan umum	Rp 30.000
3	Restoran	Rp 50.000
4	Rumah makan	Rp 50.000
5	Warung makanan dan sejenisnya	Rp 30.000
6	Kedai kopi / tempat umum	Rp 50.000
7	Bioskop / taman hiburan / tempat mainan anak – anak	Rp 30.000
8	Rumah tangga: a. Kecil b. Sedang c. Besar	a. Rp 10.000 b. Rp 15.000 c. Rp 20.000
9	Ruko 1 lantai	Rp 60.000
10	Ruko 2 lantai atau lebih	Rp 180.000
11	Usaha penimbunan pasir	Rp 250.000
12	Transportasi laut	Rp 150.000/unit

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau, 2020.

Berdasarkan tabel V.11 diatas, dana hasil retribusi pelayanan persampahan / kebersihan Kota Duri yang dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan

Mandau lebih kurang sebesar 56 juta per bulan. Retribusi tersebut berasal dari 1.369 prasarana / kegiatan di Jalan Sudirman – Sebangar dan 705 prasarana / kegiatan di Jalan Hangtuah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Staf Pengawas Satgas UPT pengelolaan sampah mengenai sub indikator membayar retribusi sampah ia mengatakan bahwa:

“Untuk iuran sampah masih ada yang menunggak pembayaran kadang ada yang sampai 3 bulan sekali. Iuran retribusi sampah ini diserahkan ke BAPEDA lalu pihak BAPEDA yang menyerahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Di Bengkalis.” (Bapak Hendryswan, Senin, 21 Desember 2020).

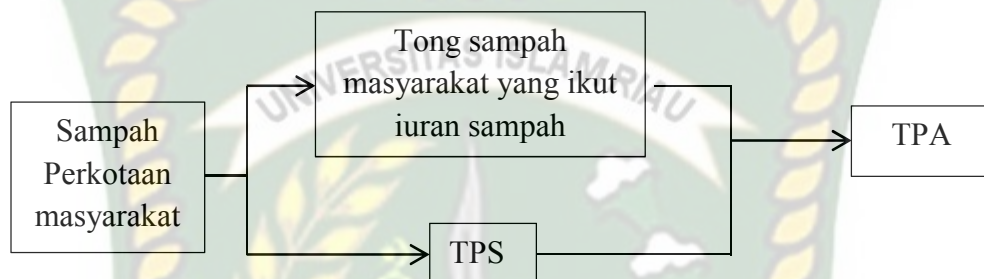
Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti juga melakukan observasi dan mewawancarai masyarakat Di Kelurahan Balai Makam mengenai sub indikator membayar retribusi sampah. Ia mengatakan bahwa:

“Beberapa masyarakat ada yang mengeluh karena besarnya iuran retribusi sampah yang ditetapkan dan pemerintah pun tidak ada melakukan koordinasi dengan masyarakat tentang iuran sampah. Masih banyak warga yang sepakat untuk swadaya sendiri seperti mengumpulkan sampah lalu ditimbun atau sampahnya dibakar. banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan dikarenakan jauhnya TPS dan tidak adanya tong sampah yang disediakan oleh pemerintah.” (Ibu Neneng, Senin, 22 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan jawaban dari responden bahwa mengenai iuran sampah pihak pemerintah tidak ada melakukan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat sehingga beberapa masyarakat ada yang merasa keberatan dengan iuran tersebut.

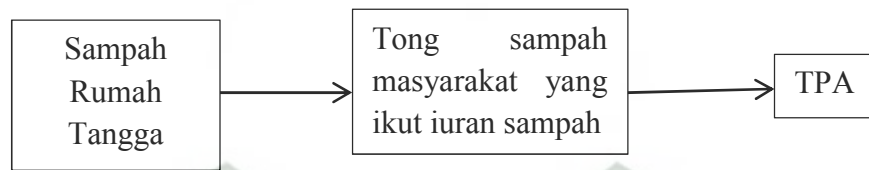
Temuan Peneliti Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis

Alur proses pengelolaan sampah di perkotaan yang dilakukan oleh UPT sebagai berikut:



Sampah organik dan non organik masyarakat diangkut oleh petugas pengangkut sampah dengan 2 cara yaitu petugas mengangkut sampah di tong sampah yang disediakan UPT bagi masyarakat yang ikut iuran retribusi sampah di blok jalan Sudirman, blok jalan Sudirman – Sebangar, dan blok jalan Hangtuh jika volume sampahnya banyak petugas langsung mengangkut sampah tersebut ke TPA. Namun, jika volume sampah di tong sampah masyarakat yang ikut iuran sedikit, petugas lanjut mengangkut sampa sampai ke TPS lalu sampah tersebut di angkut ke TPA. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah yaitu Dump Truck, Amroll, dan Bentor. Kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah menyebabkan meningkatnya volume sampah di Duri perkotaan.

Alur proses pengelolaan sampah di rumah tangga yang dilakukan pihak ketiga (BUMDES) yang bekerjasama dengan UPT sebagai berikut:



Sampah – sampah masyarakat yang diangkut oleh pihak pengelola sampah BUMDES dengan cara petugas mengangkut sampah masyarakat yang ikut iuran retribusi sampah. Untuk proses pengangkutannya Badan Usaha Milik Desa di Kelurahan Simpang Padang yang mengambil alih juga di Kelurahan Batang Dui, Badan Usaha Milik Desa di Kelurahan Batin Solapan, Badan Usaha Milik Desa di Sebangar. Sedangkan untuk Kelurahan Pematang Pudu mempunyai bank sampah sendiri dalam pengelolaan sampah. Sampah – sampah dari pihak BUMDES tersebut diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) milik Dinas Lingkungan Hidup.

C. Hambatan – Hambatan atau Kendala Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis

Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis yang ditinjau dari lima faktor indikator implementasi kebijakan antara lain: sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, Sikap Atau Kecenderungan “Disposition” Para Pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik. Adapun hambatan yang penulis ketahui meliputi:

1. Kurangnya sumberdaya anggaran dan sumberdaya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk menunjang sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Seperti TPS, Tong sampah di pinggir jalan, mobil pengangkut sampah, dan lain – lain. Hal inilah yang menyebabkan munculnya TPS liar dan penumpukan sampah di sekitar jalan Kota Duri.
2. tidak adanya unit kerja khusus dalam pengelolaan sampah yang diangkut dari TPS ke TPA, sampah – sampah tersebut hanya dibiarkan menumpuk, hal ini karena tidak adanya program dalam pengurangan potensi timbulan sampah dan tidak adanya kerjasama yang dilakukan Dinas terkait dengan bank sampah. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat tentang larangan membuang sampah pun tidak tegas sehingga masyarakat tidak takut untuk membuang sampah sembarangan.
3. kurangnya sikap pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan petugas dan kurangnya pengawasan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga lemahnya sanksi hukum bagi pelanggar peraturan.
4. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat baik disetiap Kelurahan maupun Desa di Kota Duri. Tidak adanya spanduk larangan membuang sampah di sekitar protokol jalan kota Duri.
5. pihak pemerintah tidak ada melakukan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat sehingga beberapa masyarakat ada yang merasa keberatan dengan iuran tersebut. Dan kurangnya kesadaran masyarakat akan

lingkungannya hal ini menyebabkan banyaknya tumpukan sampah di sekitar Kota Duri.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan yang dilakukan dan dianalisis serta dilengkapi dengan pembahasan pada hasil penelitian ini. Maka penulis memberikan kesimpulan secara per indikator yang menjadi tolak ukur penelitian yaitu sebagai berikut:

untuk indikator “sumberdaya” ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan yaitu terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah sehingga penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum tercukupi. Sehingga hasil penelitian untuk indikator “sumberdaya” yaitu belum terlaksana.

Indikator “karakteristik agen pelaksana” Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan yaitu kurangnya tindakan tegas / hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang melanggar peraturan membuang sampah sembarangan, disamping itu perlunya kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah agar kota Duri menjadi bersih dan sehat. Sehingga hasil penelitian untuk indikator “karakteristik agen pelaksana” yaitu belum terlaksana.

indikator “Sikap atau kecenderungan “*disposition*” para pelaksana” Ada beberapa item yang tidak berjalan dengan baik seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah, baik pengawasan masyarakat maupun petugas pengelola sampah. Permasalahan ini juga didukung

dengan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa ada beberapa titik kepadatan sampah yaitu di sekitar Jalan Pokok Jengkol, Jalan Alhamra, Jalan Sudirman, Jalan Rangau dan sejumlah ruas jalan lainnya di kota Duri. Sehingga hasil penelitian untuk indikator “Sikap atau kecenderungan *“disposition”* para pelaksana” yaitu belum terlaksana.

indikator “Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktifitas Pelaksana”. Ada beberapa item yang belum berjalan dengan maksimal seperti tidak adanya sosialisasi program kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah sehingga banyak masyarakat yang tidak tau adanya bank sampah yang dimiliki Kota Duri sehingga terjadilah penumpukan sampah. Sehingga hasil penelitian untuk indikator “Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktifitas Pelaksana” yaitu belum terlaksana.

indikator “Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik”. Beberapa item ada yang belum berjalan dengan maksimal Dengan adanya bank sampah dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat menengah kebawah dan hal ini juga dapat menurunkan volume sampah. Sehingga hasil penelitian untuk indikator “Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik” yaitu belum terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran – saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melalui UPT pengelolaan sampah kota Duri dan saran yang penulis berikan juga berlaku bagi

masyarakat dan pembaca skripsi ini. Saran yang penulis berikan kepada pihak diatas adalah:

- a. Kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melalui UPT pengelolaan sampah agar dapat memberikan dan menggunakan sumberdaya anggaran semaksimal mungkin guna penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta perlunya sumberdaya manusia yang terampil dalam pengelolaan sampah.
- b. Kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melalui Unit Pelaksana Teknis pengelolaan sampah perlunya kerjasama dalam pengelolaan sam[ah dan membuat program pengurangan sampah serta perlunya sanksi hukum tegas bagi yang melanggar peraturan larangan membuang sampah sembarangan.
- c. Kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melalui UPT pengelolaan sampah perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melalui Unit Pelaksana Teknis pengelolaan sampah perlunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara merata mengenai pengelolaan sampah.
- e. Kepada masyarakat, perlunya meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi penumpukan sampah dimana – mana dan supaya lingkungan tetap bersih dan sehat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku – buku :

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Azwar A. ,1979, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Mutiara.
- Dwiyanto. 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy* Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Grindle, Merille S (ed.). 1980. *Politics and Policy Implementation in the third world*. New Jersey: Princeton University Press.
- Huberman, A.M., & Miles , M.B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Islamy,M. Irfan. 2000, *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Maksudi. 2017. *Dasar – Dasar Administrasi Publik: Dari Klasik Dan Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Mochtar M. 1987. *Kesehatan Masyarakat*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta.
- Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Beraucracy*. Chicago: Dorsey Press.

- Sedarmayanti, 2003 *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: CV. Mandar maju.
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*, Yogyakarta: Kanisius.
- Subarsono.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. 2017. *Pengantar Manajmen: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Sudrajat, 2006, *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta: Penabar Suwadaya
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik*. Riau: Alaf Riau
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.
- Tahir. 2014. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Setiady, 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process: A Concentual Framework in: Administration and Society* v 6 No. 4 p. 445-485.clvi.
- Widodo, 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.

Zaini, Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zullkarnain, happy Bone, 2002, *Kendala Terwujudnya Good governance*. Artikel.

Zulkifli, Yogiya. 2004 *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Dokumentasi :

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Undang – undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Jurnal – jurnal

Hildawati, 2018, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Di Kota Dumai (Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Dibidang Persampahan). PUBLIKA, Vol. 5, No.1 Hal. 332-348 (2018)

Dharma Yanti, 2019, Implementasi Pengelolaan Bank Sampah Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Bank Sampah Sekolah), Pekanbaru.

Murdiningsih, 2014. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Dinas Kebersihan Kota Manado.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau